



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan ☎ (021) 739-7754 Fax (021) 739-5226

Nomor : *KU-01.09-CK/145*
Lampiran :

Jakarta, 10 April 2018

Kepada Yth,

- 1. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM)**
- 2. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi (Daftar terlampir)**

Di

Tempat

Perihal : Petunjuk Pencairan dan Pemanfaatan Dana Peningkatan Kapasitas Masyarakat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada DIPA Satuan Kerja PKPBM dan PKP Provinsi

Sehubungan dengan siklus kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang akan memasuki pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) di Kelurahan/Desa lokasi sasaran, dimana alokasinya ada pada DIPA Satuan Kerja (Satker) PKP Provinsi dan PKPBM, berikut disampaikan petunjuk pencairan dan pemanfaatan dana PKM dengan ketentuan sebagai berikut:

- Satuan PKM KOTAKU sebagai berikut :
 - Lokasi peningkatan kualitas per Kelurahan/Desa sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jenis PKM terdapat pada lampiran surat ini;
 - Lokasi pencegahan per Kelurahan/Desa sebesar Rp. 8.800.000,- dengan jenis PKM terdapat pada lampiran surat ini.
- Dana PKM merupakan swakelola yang dicairkan dalam satu kali tahapan ke rekening Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)
- Mekanisme pemberkasan dari BKM/LKM ke Satker sebagai berikut :
 - BKM/LKM menyusun usulan PKM yang ditujukan kepada Kepala Satker (Ka.Satker) PKP Provinsi/PKPBM, sesuai jenis kegiatan yang terdapat pada lampiran surat ini, dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan jadwal pelaksanaan serta *copy* rekening bank atas nama BKM/LKM;
 - Tim Fasilitator melakukan proses verifikasi kelengkapan dokumen usulan PKM dan menyampaikan ke *Oversight Consultant/Oversight Service Provider (OC/OSP)* KOTAKU Provinsi, untuk usulan PKM yang sudah memenuhi persyaratan;
 - OC/OSP KOTAKU Provinsi melakukan verifikasi kedua terhadap usulan PKM, melihat kebenaran administrasi proposal dan kesesuaian jadwal kegiatan PKM terhadap *master schedule* KOTAKU. Apabila usulan PKM sudah memenuhi kesesuaian administrasi dan substansi, OC/OSP menyampaikan ke Satker PKP Provinsi/PKPBM;
 - Satker PKP Provinsi/PKPBM menunjuk petugas penerima pekerjaan untuk melakukan verifikasi usulan PKM.
 - Kepala Satker PKP Provinsi/PKPBM dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Penguji SPM menyiapkan dokumen pencairan terhadap usulan PKM yang sudah memenuhi semua persyaratan pencairan;

4. Syarat Pemanfaatan dan pelaporan :

- a. BKM/LKM segera melaksanakan PKM sesuai dengan usulan setelah dana masuk ke rekening BKM/LKM, didampingi Tim fasilitator. Penerimaan dan pemakaian dana PKM harus dicatatkan di pembukuan sekretariat BKM/LKM;
 - b. Setelah PKM selesai dilaksanakan, Tim Fasilitator memastikan BKM/LKM membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran dan dokumentasi pelaksanaan PKM;
 - c. Sebelum disampaikan ke Satker PKP Provinsi/PKPBM, Tim Fasilitator harus melakukan verifikasi kebenaran laporan pertanggungjawaban tersebut.
5. Pengendalian pelaksanaan dan penjaminan kualitas PKM dilakukan oleh Tim Fasilitator, bersama Tim Korkot dan OC/OSP. Hasil pengendalian dan penjaminan kualitas ini dilaporkan ke Satker Provinsi/PKPBM.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman



Ir. Rina Farida MT
NIP. 195804051989032001

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR (sebagai laporan)

Lampiran 2 Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

Nomor : *KY.01.09-CK/145*

Tanggal : 10 April 2018

Perihal : **Petunjuk Pencairan dan Pemanfaatan Dana Peningkatan Kapasitas Masyarakat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada DIPA Satuan Kerja PKPBM dan PKP Provinsi**

Daftar Tujuan Surat

1. Kepala Satker PKPBM;
2. Kepala Satker PKP Provinsi Aceh;
3. Kepala Satker PKP Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Satker PKP Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Satker PKP Riau;
6. Kepala Satker PKP Provinsi Kepulauan Riau;
7. Kepala Satker PKP Provinsi Jambi;
8. Kepala Satker PKP Provinsi Bengkulu;
9. Kepala Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan;
10. Kepala Satker PKP Provinsi Bangka Belitung;
11. Kepala Satker PKP Provinsi Lampung;
12. Kepala Satker PKP Provinsi Banten;
13. Kepala Satker PKP Provinsi Jawa Barat;
14. Kepala Satker PKP Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Satker PKP Provinsi DI Yogyakarta;
16. Kepala Satker PKP Provinsi Jawa Timur;
17. Kepala Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat;
18. Kepala Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Kepala Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan;
20. Kepala Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur;
21. Kepala Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara;
22. Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara;
23. Kepala Satker PKP Provinsi Gorontalo;
24. Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Selatan;
26. Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Barat;
27. Kepala Satker PKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
28. Kepala Satker PKP Provinsi Bali;
29. Kepala Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
30. Kepala Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Kepala Satker PKP Provinsi Maluku;
32. Kepala Satker PKP Provinsi Maluku Utara;
33. Kepala Satker PKP Provinsi Papua;
34. Kepala Satker PKP Provinsi Papua Barat.

Lampiran 1 Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

Nomor : *KY-01.09-CC/145*

Tanggal : 10 April 2018

Perihal : **Petunjuk Pencairan dan Pemanfaatan Dana Peningkatan Kapasitas Masyarakat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada DIPA Satuan Kerja PKPBM dan PKP Provinsi**

PAKET PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT

A. Lokasi Peningkatan Kualitas

No	Jenis Kegiatan	Biaya 1			Biaya 2			Biaya 3			Biaya 4			Total Biaya	Keterangan						
		Event	Jumlah hari	Jumlah Peserta	Biaya	Sub Total	Event	Jumlah hari	Jumlah Peserta	Biaya Transport	Sub Total	Event	Jumlah Peserta			Biaya Bahan Serahan/Alat	Subtotal				
1	Pelatihan BKM, Lurah/Kades dan Camat	1	2	3	50.000	300.000	1	2	3	50.000	300.000	1	100.000	100.000	1	3	20.000	60.000	760.000	Paket Kluster	
2	Coaching Clinic Review Perencanaan	3	1	10	30.000	900.000										3	10	20.000	600.000	1.500.000	Paket Kelurahan
3	Pelatihan KSM/KPP	1	2	10	30.000	600.000										1	10	20.000	200.000	800.000	Paket Kelurahan
4	Pelatihan Livelihood	1	2	10	30.000	600.000										1	10	20.000	200.000	800.000	Paket Kelurahan
5	FGD Perubahan Sikap dan Perilaku	2	1	10	30.000	600.000										2	10	50.000	1.000.000	1.600.000	Paket Kelurahan
6	Pelatihan keterampilan																			1.600.000	Paket Kluster
7	Paket Pengembangan Media Sosialisasi																			2.940.000	Paket Kelurahan
Total Dana setiap Kelurahan/Desa															10.000.000						

B. Lokasi Pencegahan

No	Jenis Kegiatan	Biaya 1			Biaya 2			Biaya 3			Biaya 4			Total Biaya	Keterangan						
		Event	Jumlah hari	Jumlah Peserta	Biaya	Sub Total	Event	Jumlah hari	Jumlah Peserta	Biaya Transport	Sub Total	Event	Jumlah Peserta			Biaya Bahan Serahan/Alat	Subtotal				
1	Pelatihan BKM, Lurah/Kades dan Camat	1	2	3	50.000	300.000	1	2	3	50.000	300.000	1	100.000	100.000	1	3	20.000	60.000	760.000	Paket Kluster	
2	Coaching Clinic Review Perencanaan	3	1	10	30.000	900.000										3	10	20.000	600.000	1.500.000	Paket Kelurahan
3	Pelatihan KSM/KPP	1	2	10	30.000	600.000										1	10	20.000	200.000	800.000	Paket Kelurahan
4	Pelatihan Livelihood	1	2	15	30.000	900.000										1	15	20.000	300.000	1.200.000	Paket Kelurahan
5	FGD Perubahan Sikap dan Perilaku	2	1	10	30.000	600.000										2	10	50.000	1.000.000	1.600.000	Paket Kelurahan
6	Paket Pengembangan Media Sosialisasi																			2.940.000	Paket Kelurahan
Total Dana setiap Kelurahan/Desa															8.800.000						